



► PROGRAM PEMERINTAH

# Makan Bergizi Gratis Tetap Jalan saat Libur Sekolah

**JAKARTA—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilaksanakan saat libur sekolah. Badan Gizi Nasional sudah memiliki mekanisme pembagian MBG selama masa libur sekolah.**

Sholahuddin Al Ayyubi  
redaksi@jibnews.co

Kepala BGN, Dadan Hindayana, memaparkan skema pembagian MBG untuk siswa selama masa libur sekolah. Dadan menjelaskan masing-masing kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mengonfirmasi kepala sekolah, apakah siswa atau guru bersedia ke sekolah untuk mengambil MBG selama libur. "Untuk sekolah, Kepala SPPG akan cek apakah siswa dan guru bersedia ke sekolah, kalau bersedia, berapa kali dalam seminggu? Saat datang [ke sekolah] akan mendapatkan makanan segar," ujar dia, Jumat (20/6).

Bagi siswa dan guru yang tidak bersedia datang, MBG tidak akan dibagikan untuk sekolah tersebut. Dadan menegaskan Kepala SPPG di masing-masing wilayah yang akan berperan menentukan; mana sekolah yang tetap menerima MBG dan mana yang tidak menerima selama masa libur.

"Jika tidak bersedia datang [guru dan siswa], MBG tidak dilakukan untuk anak sekolah," katanya.

Dadan menjelaskan BGN menyelenggarakan rapat koordinasi

► Bagi siswa dan guru yang tidak bersedia datang, MBG tidak akan dibagikan untuk sekolah tersebut.

► Kementerian Dalam Negeri mengancam akan memberi sanksi ke kepala daerah yang tidak mau memberikan dukungan PSN.

bersama 1.816 SPPG untuk penjelasan mengenai petunjuk teknis (juknis) MBG selama masa libur sekolah. Untuk menyusun kebijakan yang tepat dan adaptif, BGN juga memastikan Kepala SPPG di berbagai daerah melakukan survei langsung kepada peserta didik. Hal tersebut guna mengetahui intensitas kehadiran mereka ke sekolah untuk mengambil MBG.

"Jika siswa masih bisa datang ke sekolah, MBG akan diberikan dalam bentuk makanan segar atau *fresh food*, dan siswa juga bisa dibekali makanan tahan lebih lama, seperti telur, buah, dan susu untuk satu atau dua hari ke depan," ucapnya.

Namun, lanjutnya, jika mayoritas peserta didik tidak dapat hadir ke sekolah selama masa liburan, BGN akan menyesuaikan penyaluran program dengan fokus terhadap kelompok rentan lainnya, yakni ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita agar manfaat gizi tetap tersalurkan secara optimal.

"Kami memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berlandaskan prinsip pemerataan gizi, efektivitas penyaluran dan keberlanjutan manfaat. Tidak ada keputusan sepihak terkait format pembagian MBG tanpa landasan

kebijakan dari BGN," jelasnya.

## Beri Sanksi

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri mengancam akan memberi sanksi ke kepala daerah yang tidak mau memberikan dukungan Proyek Strategis Nasional (PSN). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut aturan sanksi bagi kepala daerah yang tidak mendukung PSN itu sudah diatur di Pasal 67 Undang-Undang (UU) No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan pemerintah daerah wajib mendukung PSN, jika tidak dilaksanakan, kepala daerah dapat dikenai sanksi.

PSN yang menjadi program prioritas dari pemerintah seperti MBG, pembangunan tiga juta rumah, cek kesehatan gratis, dan program strategis lain yang memerlukan dukungan aktif dari DPRD dan kepala daerah agar berjalan optimal. "Kalau tidak dilaksanakan maka kepala daerah itu dapat dikenakan sanksi," kata Tito.

Menurut Tito, sanksi yang akan diberikan ke pemerintah daerah yang tidak mendukung PSN bervariasi mulai dari teguran tertulis sebanyak dua kali, hingga pemberhentian tetap. "Tegurannya mulai dari teguran tertulis dua kali, pemberhentian tiga bulan, sampai pemberhentian tetap dengan pemeriksaan dari inspektorat," katanya.

(Bisnis.com/Antara)